

Urgensi Penurunan Ketimpangan Gender Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Jawa Timur

Rina Karlina dan Yusuf Munandar

Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance

Jalan Dr. Wahidin Raya, Jakarta 10710, Indonesia

Email korespondensi: rinakarlina616@gmail.com, yusufmunandar@yahoo.co.id

Abstract

Covid-19 pandemic had a massive impact on socio-economic aspects and caused the national poverty rate to reverse and reach 10,14% as of March 2021. East Java Province made the most significant contribution by contributing about 30,98% of the number of poor people on the Java island. The impact of the Covid-19 pandemic was also felt especially by women, with more women who stopped working and experienced a decrease in income compared to men. Based on the GGI score, Indonesia's most significant reduction in gender inequality comes from aspects of economic participation and opportunity. Therefore, this study aims to analyze whether the decrease in gender inequality, especially financially, affects efforts to reduce poverty in East Java Province. This study uses a quantitative approach with multiple regression analysis methods for data from 2012-2020 sourced from BPS. The dependent variable is the poverty rate. Meanwhile, the independent variables are the ratio of expenditure per capita, income contribution, and the ratio of the labor force participation rate. The results of multiple regression analysis show that the independent variable of 68.66% can explain the level of poverty. In addition, all independent variables used in this study simultaneously have a significant effect on the poverty level variable. However, only the independent variable income contribution ratio has a considerable impact partially with a negative relationship to the poverty rate. Therefore, strategies to increase women's sources of income and women empowerment in an integrated and comprehensive manner must be immediately formulated and implemented. The exemplary achievements of East Java Province regarding the gender mainstreaming program are expected to be a bridge in increasing gender equality, which can reduce poverty levels and improve the welfare and quality of life of women in East Java.

Keywords: poverty rate, per capita expenditure, income contribution, labor force participation rate, gender inequality.

Abstrak

Pandemi Covid-19 berdampak sangat masif terhadap aspek sosial ekonomi dan menyebabkan tren tingkat kemiskinan nasional berbalik dan mencapai 10,14% per Maret 2021. Provinsi Jawa Timur memberikan kontribusi terbesar dengan menyumbang sekitar 30,98% terhadap jumlah orang miskin di Pulau Jawa. Dampak pandemi Covid-19 dirasakan pula khususnya oleh perempuan dengan lebih banyaknya perempuan yang berhenti bekerja dan mengalami penurunan penghasilan dibandingkan laki-laki. Berdasarkan skor GGI penurunan ketimpangan gender di Indonesia terbesar berasal dari aspek economic participation and opportunity. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ketimpangan gender khususnya dalam aspek ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi berganda data time series tahun 2012-2020 yang bersumber dari BPS. Variabel dependennya berupa tingkat kemiskinan. Sedangkan, variabel independennya berupa rasio pengeluaran per kapita, rasio sumbangan pendapatan, dan rasio tingkat partisipasi angkatan kerja. Hasil analisis

regresi berganda menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan mampu dijelaskan oleh variabel independennya sebesar 68,66%. Selain itu, seluruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat kemiskinan. Namun, hanya variabel independen rasio sumbangan pendapatan yang berpengaruh signifikan secara parsial dengan hubungan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, strategi untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan perempuan dan pemberdayaan perempuan secara terintegrasi dan komprehensif harus segera diformulasikan dan diimplementasikan. Capaian baik Provinsi Jawa Timur terkait program pengarusutamaan gender diharapkan dapat menjembatani dalam peningkatan kesetaraan gender yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup perempuan di Jawa Timur.

Kata kunci: tingkat kemiskinan, pengeluaran perkapita, sumbangan pendapatan, tingkat partisipasi angkatan kerja, ketimpangan gender.

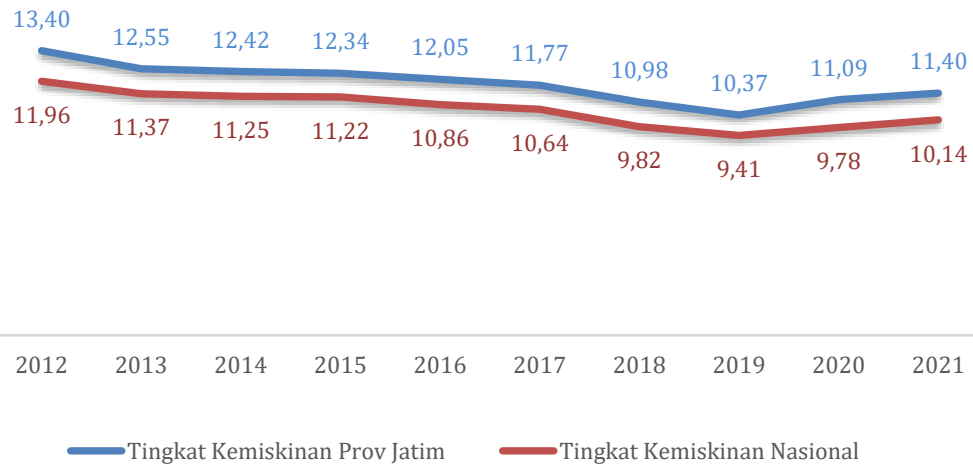
Latar Belakang

Pandemi Covid-19 yang melanda sejak tahun 2020 berdampak sangat masif terhadap aspek sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, tingkat kemiskinan pun kembali meningkat hingga mencapai angka 10,19% per September 2020 setelah sebelumnya mengalami tren penurunan. Pada Maret 2021, tingkat kemiskinan kembali relatif membaik dan turun pada tingkat 10,14%. Namun, Pulau Jawa masih menduduki tempat sebagai pulau dengan jumlah penduduk miskin terbanyak, yaitu mencapai 14,75 juta atau sekitar 53,6% dari total penduduk miskin Indonesia. Dari jumlah tersebut, Provinsi Jawa Timur memberikan kontribusi terbesar dengan menyumbang sekitar 30,98% jumlah orang miskin di Pulau Jawa dengan tingkat kemiskinan yang masih berada di atas tingkat kemiskinan nasional sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 1.

Perempuan pun tidak terkecuali terkena dampak di masa pandemi Covid-19 dan bahkan terdampak lebih berat dibandingkan laki-laki karena tekanan ekonomi (Nisak & Sugiharti, 2020). Berdasarkan hasil survey World Bank (2021) sebagaimana dapat terlihat pada Grafik 2, kepala keluarga perempuan di Indonesia lebih banyak yang berhenti bekerja saat pandemi Covid-19 dibandingkan dengan kepala keluarga laki-laki. Selain itu, lebih banyak kepala keluarga perempuan yang mengalami penurunan penghasilan di masa pandemi dibandingkan kepala keluarga laki-laki. Pada akhirnya, perempuan dan orang yang tinggal di keluarga yang dikepalai oleh perempuan akan lebih menderita yang menandakan adanya kesenjangan kemiskinan terkait gender (Rogan, 2014). Atau dengan kata lain, Bradshaw, Chant, & Linneker (2017) menyebutnya sebagai feminisasi kemiskinan.

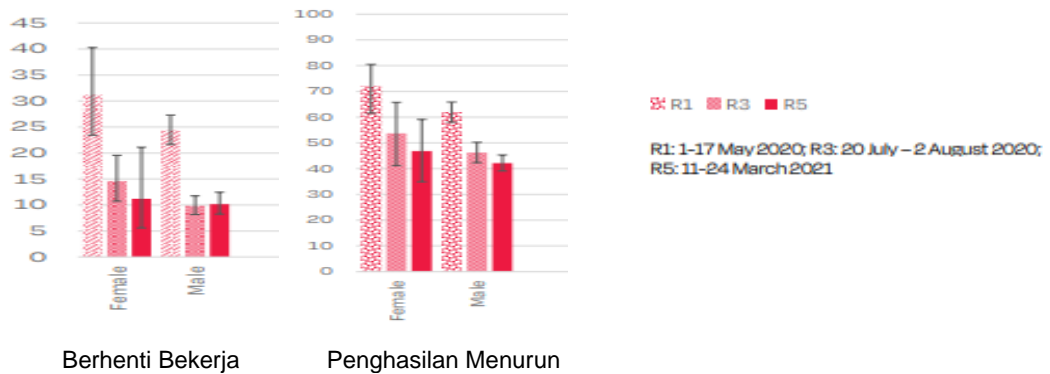
Grafik 1.

Tren Kemiskinan Nasional dan Tren Kemiskinan Provinsi Jawa Timur¹



Grafik 2.

Dampak Pandemi terhadap Kepala Keluarga Perempuan²



Upaya pengentasan kemiskinan terkait pula dengan pencapaian kesetaraan gender³. Hingga saat ini, Indonesia sendiri masih memiliki permasalahan dan tantangan terkait dengan penghapusan kemiskinan dan ketimpangan gender. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1, jumlah persentase penduduk miskin

¹ BPS

² World Bank (2021)

³ Oyekanmi, A. A., & Moliki, A. O. (2021). An Examination of Gender Inequality And Poverty Reduction. *Journal of Sustainable Development in Africa*, 23(1), 31–43.

perempuan di Indonesia hingga tahun 2019 masih lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Angka Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Gender Indonesia pun dari tahun ke tahun naik secara statistik, tetapi relatif kurang signifikan.

Tabel 1.
Persentase Penduduk Miskin Menurut Jenis Kelamin (%)⁴

Jenis Kelamin	Maret 2015	Maret 2016	Maret 2017	Maret 2018	Maret 2019
Laki-laki	10,91	10,59	10,39	9,59	9,18
Perempuan	11,54	11,14	10,89	10,06	9,63

Ketimpangan antara laki-laki dan perempuan sangat terlihat khususnya dalam hal ekonomi⁵ (KPPPA & BPS, 2018). Secara global, berdasarkan World Economic Forum (2021), skor Global Gender Gap Index (GGI) menunjukkan kemunduran Indonesia dalam upaya untuk mengatasi ketimpangan gender yang kontribusi terbesar penurunannya berasal dari aspek *economic participation and opportunity*. Padahal, adanya perbaikan dalam ketimpangan gender diharapkan juga dapat meningkatkan pemberdayaan perempuan khususnya dalam aspek ekonomi yang pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Arora, 2012; Prettnner & Strulik, 2017; Tang, 2020).

Perempuan banyak menghadapi keterbatasan dalam hal akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat dalam aspek ekonomi serta lebih rentan dibandingkan laki-laki dalam aspek tersebut⁶ sehingga akhirnya mempengaruhi kualitas hidup perempuan. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari pengeluaran per kapita yang merupakan dimensi ekonomi dari IPM yang menggambarkan kesejahteraan penduduk antara lain melalui tingkat konsumsi (BPS, 2021). Bappenas (2020) mengungkapkan bahwa perkembangan pengeluaran perkapita perempuan dari

⁴ Kementerian PPN/Bappenas (2020)

⁵ KPPPA, K. P. P. D. P. A. R. I. (2020). *Profil Perempuan Indonesia 2020*.

⁶ Nisak, S. S., & Sugiharti, L. (2020). Gender inequality and women poverty in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11(9), 375–387.

tahun ke tahun kurang signifikan dan bahkan tidak mencapai 60% dari pengeluaran perkapita laki-laki. Aspek ekonomi lainnya yang juga terkait adalah masih rendahnya TPAK perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini salah satunya disebabkan karena adanya norma sosial yang mendiskriminasi perempuan terkait dengan kodratnya dan juga terkait dengan persepsi produktivitas perempuan yang rendah karena perempuan memegang tanggung jawab domestik (Manfre et al., 2013; Fodor & Horn, 2015; Olabanji, 2020). Sumbangan pendapatan juga menjadi salah satu aspek ekonomi yang terkait dengan kesejahteraan penduduk. Sumbangan pendapatan perempuan saat ini masih lebih rendah dibandingkan laki-laki yang salah satunya disebabkan karena relatif rendahnya kontribusi perempuan pada beberapa lapangan pekerjaan yang berproduktivitas tinggi (Bappenas, 2020).

Sebagai salah satu dukungan program untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam percepatan perwujudan pembangunan yang berkeadilan dan merata, Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) memberikan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kepada Kementerian/Lembaga dan Pemda. Penghargaan ini diberikan untuk memotivasi agar instansi Pusat dan Daerah bersama-sama melakukan inisiatif dalam proses pembangunan responsif gender. Harapannya adalah dengan inisiatif implementasi strategi pengarusutamaan gender dapat mewujudkan pembangunan yang inklusif sehingga mampu meningkatkan keadilan dalam kesejahteraan masyarakat. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Pemda yang memiliki capaian yang cukup baik terkait program pembangunan gender. Pada tahun 2018, Provinsi Jawa Timur mendapatkan penghargaan APE kategori Mentor dari KPPPA dan relatif cukup banyak kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur juga yang mendapatkan penghargaan APE baik untuk kategori Utama, Madya, maupun Pratama.

Terlepas dari capaian program pengarusutamaan gender yang baik, sejalan dengan kontraksi ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020, Provinsi Jawa Timur pun mengalami kontraksi pertumbuhan yang berada di atas rata-rata nasional, yaitu sebesar -2,39% (yoy). Hal ini tentu saja berdampak pula terhadap angka kemiskinan provinsi Jawa Timur yang meningkat hingga mencapai 11,46% per September 2020. Meskipun per Maret 2021 tingkat kemiskinan di Jawa

Timur sudah menurun, penurunannya masih bersifat terbatas. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang responsif gender untuk memitigasi hal tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Oyekanmi & Moliki (2021) bahwa strategi upaya penurunan kemiskinan akan berhasil apabila terdapat pemberdayaan ekonomi perempuan dalam jumlah yang signifikan sehingga mereka terbebas dari stigma budaya dan pembatasan peran yang dihadapi saat ini sehingga dapat berkontribusi terhadap pembangunan.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ketimpangan gender berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Walid & Pratama (2020) telah melakukan penelitian mengenai ketimpangan gender dalam program pengentasan kemiskinan. Namun, metode penelitian yang digunakan adalah regresi data panel untuk Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan variabel berupa IPG, IDG, IPM, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan sumbangan pendapatan perempuan. Penelitian ini berbeda dari penelitian tersebut karena menggunakan metode regresi data *time series* pada tahun 2012 – 2020 untuk Provinsi Jawa Timur serta lebih memfokuskan pada aspek ekonomi dalam ketimpangan gender sehingga diharapkan untuk memperoleh hasil yang lebih spesifik.

Tinjauan Pustaka

Ketimpangan gender merupakan perbedaan capaian antara laki-laki dan perempuan akibat adanya diskriminasi gender (KPPPA & BPS, 2018). Di tingkat internasional, kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan dari SDGs, yaitu SDG 5 terkait pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan seluruh perempuan di dunia. Sedangkan, di level nasional kesetaraan gender diwujudkan sebagai salah satu pengarusutamaan dalam rencana pembangunan, yaitu pengarusutamaan gender. Oleh karena itu, isu gender dalam pencapaian tujuan pembangunan tidak dapat dikesampingkan dan terdapat hubungan positif antara tingkat pembangunan dengan kesetaraan gender (Fodor & Horn, 2015).

Kemiskinan menurut BPS adalah suatu kondisi ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran dengan menggunakan garis kemiskinan. Penghapusan

kemiskinan merupakan isu penting sebagai salah satu sasaran pembangunan nasional untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Tujuan ini juga tercantum dalam SDG 1, yaitu terkait penghapusan kemiskinan dalam segala bentuknya di seluruh bagian dunia. Kemiskinan juga merupakan isu strategis pembangunan kewilayahan di Indonesia sehingga target penurunan tingkat kemiskinan tidak hanya berada di Pusat, tetapi juga di daerah.

Bradshaw, Chant, & Linneker (2017) menyebutkan adanya istilah feminisasi kemiskinan yang menggambarkan bahwa perempuan lebih banyak hidup dalam kemiskinan dibandingkan laki-laki. Feminisasi kemiskinan juga mengacu kepada kerentanan perempuan dalam kondisi krisis atau tekanan ekonomi sehingga mereka lebih terdampak dalam kondisi tersebut (Nisak & Sugiharti, 2020) dan mengakibatkan semakin banyaknya jumlah perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sebagai contoh, Indonesia menunjukkan bahwa persentase penduduk perempuan miskin selama tahun 2015-2019 lebih besar dibandingkan laki-laki (PPN/Bappenas, 2020). Lebih lanjut, Marianti (2014) dan Nisak & Sugiharti (2020) mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki proporsi kemiskinan perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki khususnya pada rentang usia di atas 60 tahun dan juga pada kepala keluarga perempuan.

Adanya feminisasi kemiskinan tersebut diperkuat dengan adanya beban ganda yang ditanggung perempuan dalam keluarga sehingga perempuan seringkali mengalami kendala dalam menjalankan kehidupan sosial ekonominya (Purnama, 2019). Peran ganda ini dijalankan perempuan dalam bentuk peran sebagai ibu rumah tangga dan juga peran sebagai pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Di Indonesia hal tersebut menyebabkan salah satu permasalahan sosial yang disebut dengan perempuan rawan sosial ekonomi dan salah satu upaya Pemerintah untuk mengatasinya adalah dengan pemberdayaan perempuan (Purnama, 2019). Pemberdayaan perempuan dapat meningkatkan kesejahteraan yang salah satunya diperoleh jika perempuan dalam keluarga juga bekerja dengan mengkombinasikannya sambil tetap mengerjakan tugas reproduktif dan domestik perempuan (Marianti, 2014). Selanjutnya, dijelaskan pula bahwa diversifikasi sumber pendapatan menjadi hal yang sangat penting untuk keluar dari kemiskinan.

Dalam SDG 1 tertuang pula bahwa prioritas target penghapusan kemiskinan salah satunya adalah mengatasi dampak kemiskinan yang tidak proporsional terhadap perempuan. Namun, upaya Pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut mengalami banyak tantangan dan permasalahan khususnya dengan masih adanya kesenjangan gender dalam berbagai aspek kehidupan (Siscawati et al., 2020). Ketimpangan gender mengakibatkan perempuan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang mengakibatkan rendahnya standar hidup layak perempuan dan keterbatasan mereka dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi (Matthew et al., 2020). Dengan demikian, semakin tinggi ketimpangan gender akan berdampak terhadap semakin lebarnya kesenjangan kemiskinan antara perempuan dan laki-laki (Espinoza-Delgado & Silber, 2018). Selain itu, kesenjangan yang dihadapi oleh perempuan dalam berbagai aspek tersebut akan berdampak terhadap lemahnya kekuatan ekonomi perempuan dan berujung kepada naiknya tingkat kemiskinan perempuan (Oyekanmi & Moliki, 2021). World Economic Forum (2021) dalam hal ini menekankan bahwa aspek ekonomi masih mendominasi permasalahan dalam ketimpangan gender. Hal ini juga ditekankan oleh KPPPA (2020) yang menyatakan bahwa kontribusi perempuan di bidang ekonomi sangat penting mengingat jumlah penduduk perempuan Indonesia mencapai setengah populasi penduduk.

Kesenjangan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki mengakibatkan semakin melebarnya ketimpangan di negara berkembang karena perempuan memiliki keterbatasan akses dan kendali terhadap sumber daya ekonomi sehingga standar hidup layak perempuan menjadi rendah karena tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (Matthew et al., 2020). Akibat Covid-19, pertumbuhan IPM Indonesia mengalami perlambatan pada tahun 2020 yang berasal dari penurunan dimensi standar hidup layak yang diwakili pengeluaran riil per kapita (BPS, 2021). Lebih lanjut, dijelaskan bahwa pengeluaran riil perkapita menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk sebagai dampak membaiknya perekonomian yang salah satunya dapat dilihat dari konsumsi penduduk. Di sisi lain, Agbodji et al. (2015) juga mengungkapkan bahwa tingginya pengeluaran perkapita memiliki keterkaitan dengan rendahnya ketimpangan gender.

Salah satu upaya yang menjadi target dalam penghapusan kemiskinan adalah tercapainya tingkat partisipasi kerja penuh untuk seluruh individu termasuk perempuan (Agbodji et al., 2015). Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menunjukkan proporsi partisipasi penduduk di bidang ekonomi (KPPPA, 2020). Semakin tinggi angka partisipasi kerja perempuan akan meningkatkan kontribusi perempuan terhadap sumber daya keluarga yang nantinya akan berkaitan dengan tingkat konsumsi, tabungan, dan investasi (Arora, 2012). TPAK merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat pasokan tenaga kerja dengan melihat penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi (BPS, 2021). Kegiatan ekonomi yang berkembang, rata-rata upah/gaji, status perkawinan serta relasi gender antara laki-laki dan perempuan di suatu wilayah akan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya TPAK (KPPPA, 2020). Dengan kata lain, tingginya TPAK perempuan akan dipengaruhi oleh relasi gender yang ada. Berdasarkan data KPPPA (2020), TPAK perempuan lebih rendah di bawah laki-laki dalam tiga tahun terakhir dan tidak banyak mengalami peningkatan yang diantaranya disebabkan oleh konstruksi sosial dan masih adanya ketimpangan gender. Selanjutnya disampaikan pula bahwa dengan peningkatan TPAK perempuan akan meningkatkan potensi dan keterampilan perempuan yang pada akhirnya dapat meningkatkan capaian pembangunan dan membantu untuk mengatasi kemiskinan.

Aspek ekonomi lainnya terkait dengan ketimpangan gender dapat dilihat dari dimensi ekonomi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yaitu sumbangan pendapatan. Sumbangan pendapatan merupakan salah satu komponen pembentuk IDG yang masih sangat timpang (Putrie & Rahman, 2019; Bappenas (2020)). UNDP juga menggunakan indikator sumbangan pendapatan dalam penghitungan Gender Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Measure (GEM). Berdasarkan data dari Bappenas (2020) IDG Indonesia makin membaik perkembangannya disebabkan adanya peningkatan dari sumbangan pendapatan perempuan. Lebih lanjut diungkapkan bahwa rasio sumbangan pendapatan perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki yang diantaranya karena perempuan berkontribusi relatif rendah pada beberapa lapangan pekerjaan yang produktivitasnya tinggi seperti pertambangan, gas, informasi dan komunikasi. Hal ini senada dengan Putrie & Rahman (2019) yang mengungkapkan bahwa

pendapatan akan semakin meningkat dengan semakin tingginya daya tawar perempuan yang direpresentasikan juga dengan semakin tingginya proporsi perempuan bekerja.

Metodologi

Studi ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan statistik inferensial yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fenomena sosial yang diteliti serta eksplorasi terhadap fenomena tersebut (Vaismoradi et al., 2016). Berdasarkan hasil statistik tersebut kemudian akan dipaparkan lebih lanjut mengenai hal-hal terkait variabel yang digunakan dalam penelitian. Pada bagian berikut akan dipaparkan lebih lanjut mengenai jenis data dan metode yang digunakan dalam penelitian.

Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id). Berkenaan dengan tujuan penelitian, data yang digunakan adalah data terkait kemiskinan dan data terkait aspek gender di bidang ekonomi Provinsi Jawa Timur mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020. Rilis tingkat kemiskinan per periode September baru dimulai pada tahun 2012 dan untuk tahun 2021 tingkat kemiskinan per September 2021 belum dirilis sehingga data dikumpulkan hanya untuk periode 2012 sampai dengan 2020.

Provinsi Jawa Timur dijadikan objek penelitian karena merupakan salah satu provinsi yang memiliki capaian program pengarusutamaan gender yang cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan penghargaan APE kategori Mentor dari KPPPA yang diberikan kepada Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018. Relatif cukup banyak juga kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur yang mendapatkan penghargaan APE baik untuk kategori Utama, Madya, maupun Pratama. Akan tetapi, di sisi lain tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur juga lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan nasional dan memberikan kontribusi terbesar terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa. Dengan demikian, Provinsi Jawa Timur dianggap

cukup representatif untuk melihat pengaruh ketimpangan gender terhadap kemiskinan.

Data kemiskinan yang digunakan adalah data tingkat kemiskinan periode bulan September 2012 sampai dengan bulan September 2020. Data aspek gender di bidang ekonomi pun menggunakan periode 2012 – 2020 dengan mengacu pada penelitian terdahulu sebagaimana telah dibahas dalam tinjauan pustaka. Data tersebut terdiri dari pengeluaran per kapita, sumbangan pendapatan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja.

Variabel yang digunakan untuk menggambarkan aspek ketimpangan gender di bidang ekonomi dihitung dengan menggunakan indeks paritas gender sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Sari et al. (2019) dalam menganalisis pengaruh ketimpangan gender terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2011-2017. Indeks paritas (IP) dilakukan dengan langsung membandingkan capaian kinerja indikator perempuan dengan capaian kinerja indikator laki-laki dengan formula sebagai berikut (Sari et al., 2019):

$$IP = \frac{\text{Capaian Kinerja Perempuan}}{\text{Capaian Kinerja Laki - laki}}$$

Nilai IP sama dengan 1 menunjukkan bahwa tidak ada ketimpangan gender antara perempuan dan laki-laki. Sedangkan, nilai IP lebih kecil dari 1 menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan gender dengan capaian kinerja indikator perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Sebaliknya, nilai IP lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan gender dengan capaian kinerja indikator perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Metode

Data akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda data *time series* yang menggunakan data runtun waktu mulai dari tahun 2012 – 2020 dengan bantuan aplikasi pengolah data Stata 16 MP pada tingkat signifikansi 5%. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen berupa tingkat kemiskinan serta variabel independen berupa rasio pengeluaran per kapita, rasio sumbangan pendapatan, dan rasio tingkat partisipasi angkatan kerja yang dapat digambarkan melalui model persamaan sebagai berikut:

$$POV_t = \alpha + \beta_1 RPPK_t + \beta_2 RSP_t + \beta_3 RTPAK_t + e_t$$

dimana POV_t = tingkat kemiskinan; $RPPK_t$ = rasio pengeluaran perkapita; RSP_t = rasio sumbangan pendapatan; $RTPAK_t$ = rasio tingkat partisipasi angkatan kerja. Konstanta persamaan regresi ditunjukkan dengan α ; koefisien regresi ditunjukkan dengan β_1, β_2 , dan β_3 ; e menunjukkan *error term*; t menunjukkan data pada periode t . Dengan demikian, hipotesis yang akan dibuktikan dalam penelitian ini adalah variabel independen yang berupa aspek ekonomi dalam ketimpangan gender yang terdiri dari rasio pengeluaran perkapita, rasio sumbangan pendapatan, dan rasio tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh terhadap variabel dependennya, yaitu tingkat kemiskinan.

Pengolahan data sebelum analisis regresi berganda data *time series* diawali dengan uji asumsi klasik yang merupakan prasyarat sebelum dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan regresi. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa nilai residual yang merupakan beda antara variabel dependen dengan prediksi variabel dependen berdasarkan model regresi telah terdistribusi normal. Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel penelitian dalam data *time series* yang digunakan. Uji multikolinearitas dilakukan untuk memastikan bahwa tidak terdapat korelasi antar variabel independennya karena tingginya nilai multikolinearitas dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam estimasi koefisien regresi dan tingginya nilai *standard error*. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk memastikan adanya perbedaan dalam varian variabel pada model regresi yang merupakan salah satu prasyarat sebuah model regresi yang baik.

Analisis regresi berganda data *time series* dijalankan setelah uji asumsi klasik dilaksanakan dan model persamaan telah memenuhi seluruh prasyarat dalam uji asumsi klasik. Uji hipotesis terdiri dari analisis koefisien determinasi, uji F, dan uji t. koefisien determinasi (R^2) menunjukkan seberapa baik model yang dibuat dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Semakin besar nilai koefisien determinasi, semakin baik pula model tersebut karena variabel-variabel independennya mampu menjelaskan informasi lebih luas mengenai variabel dependennya. Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel

independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan, uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian akan memaparkan mengenai hasil temuan yang diperoleh dalam penelitian ini yang dikelompokkan dalam tiga bagian. Bagian pertama memaparkan mengenai hasil analisis deskriptif variabel penelitian. Bagian kedua memaparkan mengenai hasil uji asumsi klasik. Bagian ketiga memaparkan mengenai hasil analisis regresi data *time series*.

Analisis Deskriptif

Hasil pengujian dengan aplikasi pengolah data STATA 16 MP salah satunya mengeluarkan output berupa ringkasan deskriptif mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Pada Tabel 2 dapat kita lihat bahwa jumlah observasi penelitian adalah sebanyak 9 buah sampel atau observasi.

Tabel 2.
Hasil Analisis Deskriptif Model Penelitian

Variabel	Obs	Mean	Std. Dev.	Min.	Max.
Tahun	9	2016	2,738613	2012	2020
Rppk	9	0,6118501	0,0208622	0,5774891	0,6444165
Rsp	9	0,5412188	0,0186057	0,5042118	0,557875
Rtpak	9	0,6485465	0,0131764	0,624241	0,6680052
Kemiskinan	9	11,77	0,9284798	10,2	13,08
Res	9	3,10e-09	0,4109542	-,7991198	0,6315427

Variabel independen rasio pengeluaran perkapita memiliki nilai minimum 0,5774891 dan nilai maksimum 0,6444165. Nilai rata-rata variabel rasio pengeluaran perkapita ini adalah sebesar 0,6118501 dengan standar deviasi sebesar

0,0208622. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa distribusi data variabel rasio pengeluaran perkapita cukup merata karena nilai *mean* berada di kisaran tengah antara nilai minimum dan maksimum data serta standar deviasinya relatif kecil yang menunjukkan bahwa data sampel berada dekat dengan *mean* sehingga data dapat dikatakan homogen.

Variabel independen rasio sumbangan pendapatan memiliki nilai minimum 0,5042118 dan nilai maksimum 0,557875. Nilai rata-rata variabel rasio pengeluaran perkapita ini adalah sebesar 0,5412188 dengan standar deviasi sebesar 0,0186057. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa nilai *mean* relatif mendekati nilai maksimum data yang menunjukkan distribusi data variabel rasio pengeluaran perkapita condong berada di sebelah kanan nilai *mean*. Namun, standar deviasi data variabel rasio pengeluaran perkapita relatif kecil.

Variabel independen rasio tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki nilai minimum 0,624241 dan nilai maksimum 0,6680052. Nilai rata-rata variabel rasio pengeluaran perkapita ini adalah sebesar 0,6485465 dengan standar deviasi sebesar 0,0131764. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa distribusi data variabel rasio pengeluaran perkapita cukup merata karena nilai *mean* berada di kisaran tengah antara nilai minimum dan maksimum data dengan standar deviasi yang relatif kecil.

Variabel dependen tingkat kemiskinan memiliki nilai minimum 10,2 dan nilai maksimum 13,08. Nilai rata-rata variabel rasio pengeluaran perkapita ini adalah sebesar 11,77 dengan standar deviasi sebesar 0,9284798. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa nilai *mean* berada mendekati data dengan nilai minimum yang menunjukkan bahwa data variabel kemiskinan terdistribusi condong berada di sebelah kiri nilai *mean*. Nilai standar deviasi dari variabel kemiskinan relatif cukup lebih tinggi dibandingkan variabel lainnya meskipun masih relatif tidak terlalu besar.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dipaparkan dalam bagian ini meliputi hasil uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas pada tingkat signifikansi 5%. Hasil uji asumsi klasik atas variabel yang digunakan dalam

model penelitian merupakan prasyarat agar data dapat diproses lebih lanjut ke tahap analisis regresi data *time series*.

Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan melalui uji *skewness/kurtosis* dan uji *shapiro-wilk W*. Pada uji *skewness*, apabila nilai $\text{Prob}>\chi^2$ lebih dari 0,05, residual berarti telah berdistribusi normal. Berdasarkan Tabel 3 dapat kita lihat bahwa nilai $\text{Prob}>\chi^2$ adalah 0,4717 yang menunjukkan bahwa residual terdistribusi normal. Dengan demikian, persamaan regresi telah memenuhi syarat uji normalitas.

Tabel 3.
Hasil Uji Normalitas

<i>Skewness/kurtosis test for normality</i>					
Variabel	Obs	Pr(skewness)	Pr(kurtosis)	Adj chi2(2)	Prob>chi2
Res	9	0,4353	0,4027	1,50	0,4717
<i>Shapiro-wilk W test for normal data</i>					
Variabel	Obs	W	V	Z	Prob>Z
Res	9	0,97082	0,429	-1,291	0,90166

Selain menguji normalitas dengan menggunakan *skewness/kurtosis*, penelitian ini juga menguji normalitas dengan menggunakan uji *shapiro-wilk w* karena jumlah observasi data dalam penelitian ini kurang dari lima puluh. Uji normalitas pada metode ini dilakukan dengan melihat nilai $\text{Prob}>Z$. Residual dinyatakan telah berdistribusi normal apabila nilai $\text{prob}>Z$ lebih dari 0,05. Pada tabel XX dapat kita lihat bahwa nilai $\text{Prob}>Z$ persamaan regresi adalah sebesar 0,90166. Dengan demikian, residual pada persamaan regresi ini juga dinyatakan berdistribusi normal.

Uji autokorelasi dalam penelitian ini pertama-tama dilakukan dengan menggunakan Uji Durbin-Watson. Nilai statistik Durbin-Watson dengan 4 variabel

dan 9 observasi adalah 2,16. Selanjutnya, dengan melihat tabel statistik Durbin-Watson diketahui bahwa nilai batas bawah (DL) adalah 0,183 dan nilai batas atas (DU) adalah 2,433. Model persamaan dinyatakan tidak memiliki autokorelasi jika nilai $DW > DU$ dan $(4-DW) > DU$. Karena nilai DW persamaan regresi penelitian ini adalah sebesar 2,16 yang berada diantara nilai DL dan DU, hal ini berarti tidak dapat disimpulkan apakah model persamaan regresi memiliki permasalahan autokorelasi atau tidak.

Uji autokorelasi kedua kemudian dilakukan dengan menggunakan uji Breusch-Godfrey LM karena uji autokorelasi pertama menggunakan Durbin-Watson tidak dapat menyimpulkan ada tidaknya permasalahan autokorelasi dalam penelitian ini. Uji Breusch-Godfrey LM memiliki H_0 yang menyatakan bahwa model persamaan regresi memiliki permasalahan autokorelasi dan H_1 yang menyatakan bahwa model persamaan regresi tidak memiliki permasalahan autokorelasi. Dengan demikian, apabila nilai $Prob > \chi^2$ lebih kecil dari 0,05, H_0 diterima atau terdapat permasalahan autokorelasi dalam persamaan regresi. Namun, apabila $Prob > \chi^2$ lebih besar dari 0,05, H_0 ditolak atau tidak terdapat permasalahan autokorelasi dalam persamaan regresi. Pada Tabel 4 dapat kita lihat bahwa nilai $Prob > \chi^2$ persamaan regresi penelitian ini adalah 0,3621 atau lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah H_0 ditolak sehingga dapat dinyatakan bahwa persamaan regresi bebas dari permasalahan autokorelasi.

Tabel 4.
Hasil Uji Autokorelasi

Lags (<i>p</i>)	Chi2	Df	Prob > chi2
1	0,831	1	0,3621

H_0 : no serial correlation

Uji multikolinearitas penelitian ini dilakukan dengan menggunakan nilai *variance inflation factor* (VIF). Model persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki gejala multikolinearitas atau tidak memiliki korelasi antar variabel independennya. Apabila nilai $VIF < 10$ dan $1/VIF > 0,1$, dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi linier berganda tidak memiliki gejala multikolinearitas. Pada Tabel 5 dapat kita lihat bahwa seluruh nilai VIF variabel independen model persamaan regresi penelitian ini bernilai < 10 . Selain itu, nilai $1/VIF$ seluruh variabel independen model persamaan regresi penelitian ini juga memiliki nilai $> 0,1$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi penelitian ini bebas dari gejala multikolinearitas.

Tabel 5.
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	1/VIF
Rppk	4,15	0,241191
Rtpak	4,05	0,246924
Rsp	1,80	0,556241
Mean VIF	3,33	

Uji heteroskedastisitas penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Breusch-Pagan/Cook-Weisberg. Sebuah model persamaan regresi harus memiliki sifat homoskedastisitas sehingga apabila terdapat gejala heteroskedastisitas dalam persamaan regresi, model tersebut harus diperbaiki terlebih dahulu. Uji Breusch-Pagan/Cook-Weisberg dilakukan dengan melihat nilai *P value*, yaitu apabila nilai $Prob > \chi^2$ lebih besar dari 0,05, persamaan regresi dinyatakan bebas dari gejala heteroskedastisitas. Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai $prob > \chi^2$ persamaan regresi adalah sebesar 0,0998 atau lebih besar dari 0,05 sehingga model persamaan regresi dinyatakan bersifat homoskedastisitas atau tidak memiliki gejala heteroskedastisitas.

Tabel 6.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

<i>Breusch-Pagan / cook-weisberg for heteroskedasticity</i>
H_0 : Constant variance
Variables: fitted values of kemiskinan
chi2(1) = 2,71
Prob > chi2 = 0,0998

Analisis Regresi Berganda

Setelah melaksanakan uji asumsi klasik terhadap model regresi, hasilnya menunjukkan bahwa model regresi tersebut telah memenuhi semua asumsi yang dipersyaratkan untuk melakukan analisis regresi berganda. Oleh karena itu, langkah berikutnya dalam pengolahan data penelitian adalah melakukan pengujian hipotesis dengan analisis regresi berganda. Pengujian hipotesis terdiri dari tiga bagian, yaitu (1) analisis koefisien determinasi, (2) uji koefisien regresi simultan (uji F), dan (3) uji koefisien regresi parsial (uji t).

Dalam analisis regresi berganda perlu untuk dilihat nilai koefisien determinasi dari model regresi persamaan penelitian. Hal ini dapat dilihat dari nilai *R-squared* yang menunjukkan seberapa besar seluruh variabel independen secara simultan mampu untuk menjelaskan variabel dependennya. Pada tabel X dapat dilihat bahwa nilai *R-squared* model persamaan regresi penelitian cukup besar, yaitu sebesar 0,8041. Hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel independen berupa tingkat kemiskinan mampu dijelaskan oleh variabel dependen dalam penelitian, yaitu rasio pengeluaran perkapita, rasio sumbangan pendapatan, dan rasio tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 80,41%. Namun, nilai *R-squared* ini memiliki kelemahan berupa akan semakin baik nilainya dengan penambahan variabel. Oleh karena itu, nilai *adjusted R-square* lebih representatif untuk digunakan karena lebih mempertimbangkan juga jumlah observasi dan variabel yang digunakan dalam penelitian.

Nilai *adjusted R square* dari penelitian ini adalah sebesar 0,6866. Nilai tersebut berarti bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependennya sebesar 68,66%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan sebesar 68,66% dipengaruhi oleh rasio pengeluaran perkapita, rasio sumbangan, dan rasio tingkat partisipasi angkatan kerja. Sedangkan, sisanya sebesar 31,34% (100% - 68,66%) dijelaskan oleh variabel lainnya di luar model regresi yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Tabel 7.

Hasil Uji Koefisien Regresi Simultan (Uji F) dan Koefisien Determinasi

<i>Source</i>	SS	Df	MS
Model	5,54553195	3	1,84851065
Residual	1,35106658	5	,270213316
Total	6,89659853	8	,862074816
<i>Number of obs = 9</i>			
F(3, 5) = 6,84			
Prob > F = 0,0321			
R-squared = 0,8041			
Adj R-squared = 0,6866			
Root MSE = ,51982			

Pada Tabel 7 terdapat juga nilai MSE atau *standard error of estimate* yang merupakan penyimpangan antara model persamaan regresi dengan nilai variabel dependen riilnya. Sebuah model regresi dikatakan baik untuk dijadikan sebagai sebuah model estimasi apabila nilai *Root MSE* < standar deviasi variabel dependennya (POV). Semakin kecil nilai *standard error of estimate*, semakin baik model persamaan regresi untuk dijadikan sebagai model estimasi. Nilai *Root MSE* model persamaan regresi penelitian ini adalah sebesar 0,51982. Sedangkan, nilai standar deviasi variabel dependennya sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2 adalah sebesar 0.9284798. Dengan demikian, nilai *Root MSE* lebih kecil dari standar

deviasi variabel dependennya sehingga model persamaan regresi penelitian ini dapat dikatakan baik untuk dijadikan sebagai sebuah model estimasi.

Salah satu uji hipotesis dalam analisis regresi berganda adalah uji F atau uji koefisien regresi simultan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependennya. Pada Tabel 7 dapat kita lihat bahwa jumlah sampel yang diobservasi adalah sebanyak 9 buah. F (3,5) berarti bahwa uji F dilakukan terhadap DF 3 dan 5. DF 3 menunjukkan jumlah variabel yang diuji dikurangi dengan satu, yaitu 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Sedangkan, 5 menunjukkan jumlah observasi dikurangi dengan jumlah variabel, yaitu 9 dikurangi 4 sama dengan 5.

Pada Tabel 7 dapat kita lihat bahwa nilai Prob > F adalah sebesar 0,0321 yang menunjukkan nilai uji F kurang dari 0,05. Interpretasi dari nilai uji F adalah apabila nilai Prob > F, uji F menolak H_0 pada taraf signifikansi 5% atau hal ini berarti bahwa seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang secara simultan berpengaruh signifikan atau mampu menjelaskan perubahan pada variabel tingkat kemiskinan adalah rasio pengeluaran perkapita, rasio sumbangan pendapatan, dan rasio tingkat partisipasi angkatan kerja. Atau dapat dikatakan pula bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari rasio pengeluaran perkapita, rasio sumbangan pendapatan, dan rasio tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan model persamaan regresi yang dinyatakan cocok atau *fit* dalam menjelaskan variabel dependennya.

Analisis regresi lainnya yang perlu dilakukan adalah uji t atau uji parsial, yaitu uji yang dilakukan untuk mengetahui variabel independen mana yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya. Variabel independen dapat dikatakan berpengaruh signifikan pada taraf 5% apabila nilai $P > |t|$ atau disebut juga sebagai *p value*/signifikansi lebih kecil dari 0,05. Atau dengan kata lain H_0 diterima apabila nilai $P > |t|$ lebih besar dari 0,05.

Pada Tabel 8 dapat kita lihat bahwa untuk variabel rasio pengeluaran perkapita, nilai $P > |t|$ adalah sebesar 0,405 yang berarti lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, H_0 diterima yang berarti bahwa rasio pengeluaran perkapita tidak

berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat kemiskinan. Untuk variabel rasio sumbangan pendapatan, nilai $P > |t|$ adalah -47,42008 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa H_0 ditolak atau H_1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa rasio sumbangan pendapatan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat kemiskinan. Pada variabel rasio tingkat partisipasi angkatan kerja, nilai $P > |t|$ adalah sebesar 0,877 yang berarti lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, H_0 diterima yang berarti bahwa rasio tingkat partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat kemiskinan.

Tabel 8.
Hasil Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Kemiskinan	Coef.	Std. Err.	T	P > t 	Beta
Rppk	16,31275	17,93775	0,91	0,405	,3665343
Rsp	-47,42008	13,24433	-3,58	0,016	-,9502471
Rtpak	4,556828	28,06916	0,16	0,877	,0646676
_cons	24,49836	24,07021	1,02	0,355	.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa nilai $P > |t|$ yang lebih kecil dari 0.05 hanya dimiliki oleh variabel independen rasio sumbangan pendapatan (RSP). Hal ini berarti bahwa hanya satu variabel independen, yaitu variabel rasio sumbangan pendapatan yang berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependennya, yaitu tingkat kemiskinan. Sedangkan, kedua variabel independen lainnya, yaitu rasio pengeluaran perkapita dan rasio tingkat partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependennya. Dengan kata lain, variabel independen yang paling baik dalam memprediksi variabel dependen berupa tingkat kemiskinan adalah rasio sumbangan pendapatan.

Berdasarkan hasil uji parsial juga dapat dilihat juga nilai *standard error* untuk setiap variabel penelitian yang merupakan penyimpangan dari nilai koefisien variabel regresi dan nilai konstanta. Semakin kecil nilai penyimpangan atau

standard error-nya menunjukkan bahwa semakin berarti kontribusi variabel tersebut terhadap variabel dependennya. Pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa nilai *standard error* untuk koefisien regresi variabel rasio pengeluaran perkapita dan rasio tingkat partisipasi angkatan kerja relatif besar sehingga interval keyakinannya semakin melebar dan kontribusinya juga semakin mengecil. Sedangkan, untuk variabel rasio sumbangan pendapatan *standard error*-nya relatif lebih kecil sehingga variabel tersebut semakin berarti kontribusinya terhadap variabel dependennya.

Pada Tabel 8 dapat dilihat pula nilai *Coef* atau koefisien masing-masing variabel independen yang merupakan nilai *unstandardized coefficients Beta* dan juga nilai koefisien dari konstanta persamaan regresi. Oleh karena itu, nilai koefisien inilah yang digunakan dalam model persamaan regresi. Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis regresi berganda data *time series* diperoleh model regresi dengan persamaan sebagai berikut:

$$POV_t = 24.50 + 16.31RPPK_t - 47.42RSP_t + 4.56RTPAK_t + e_t$$

Penelitian ini memiliki konstanta sebesar 24,50 yang bersifat menambah nilai persamaan regresi. Hal ini berarti bahwa apabila seluruh variabel independen, yaitu rasio pengeluaran per kapita, rasio sumbangan pendapatan, dan rasio tingkat partisipasi angkatan kerja nilainya sebesar 0, tingkat kemiskinan adalah sebesar 24,50. Ketiga variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai yang bervariasi, yaitu terdapat dua variabel independen yang memiliki nilai positif yang terdiri dari variabel rasio pengeluaran perkapita. Kemudian, terdapat satu variabel bernilai negatif, yaitu rasio sumbangan pendapatan yang memiliki nilai koefisien relatif cukup besar dari nilai koefisien variabel independen lainnya.

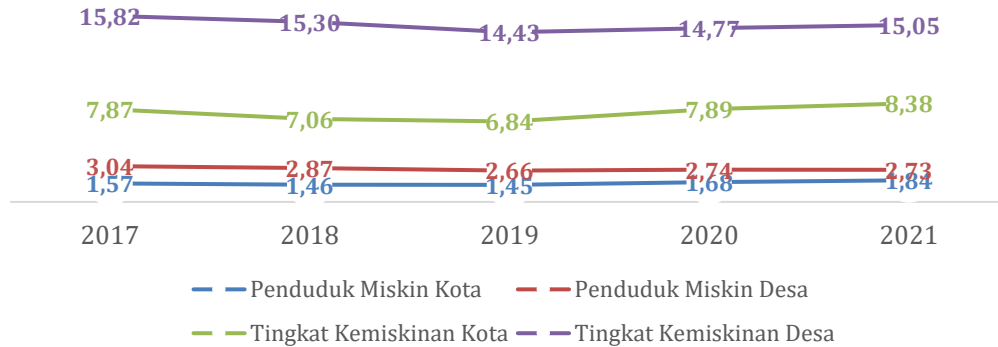
Nilai koefisien regresi variabel independen yang pertama, yaitu rasio pengeluaran per kapita (RPPK) adalah sebesar 16,31. Hal ini berarti bahwa jika terdapat kenaikan variabel rasio pengeluaran perkapita sebesar 1 poin maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 16,31 dengan asumsi variabel yang lain tetap (*ceteris paribus*). Pada variabel independen yang kedua, yaitu variabel rasio sumbangan pendapatan (RSP), nilai koefisien regresinya menunjukkan nilai yang

negatif, yaitu sebesar -47,42 yang menunjukkan hubungan berlawanan antara variabel independen dengan variabel dependennya. Artinya, apabila terjadi kenaikan variabel rasio sumbangan pendapatan sebesar 1 poin, akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 47,42 dengan asumsi variabel yang lain tetap (*ceteris paribus*). Variabel independen yang ketiga, yaitu rasio tingkat partisipasi angkatan kerja (RTPAK) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 4,56. Hal ini berarti bahwa apabila rasio tingkat partisipasi angkatan kerja naik sebesar 1 poin, tingkat kemiskinan akan naik sebesar 4,56% dengan asumsi variabel yang lain tetap (*ceteris paribus*).

Diskusi

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu wilayah yang memberikan kontribusi Pendapatan Domestik Regional Bruto terbesar ketiga di Indonesia dan provinsi kedua di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian di Pulau Jawa pada tahun 2020 di masa pandemi Covid-19. Tiga lapangan usaha utama yang menjadi primadona struktur ekonomi Jawa Timur, yaitu industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; serta pertanian, kehutanan dan perikanan. Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Jawa Timur adalah sebanyak 40,67 juta jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 20.291.592 jiwa, lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan yang sebanyak 20.374.104 jiwa dengan rasio sebesar 99,6. Provinsi Jawa Timur pun sedang mengalami bonus demografi karena 71,65% penduduknya berada pada usia produktif (15-64 tahun). Namun, jumlah penduduk miskinnya pada tahun 2021 masih berkontribusi cukup banyak dan terkonsentrasi di daerah pedesaan sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 3. Hal ini merupakan salah satu implikasi dari penduduk di Jawa Timur yang mayoritas juga tinggal di pedesaan hampir di setiap kabupaten.

Grafik 3.
Tren Kemiskinan Provinsi Jawa Timur periode Maret 2021



Sumber: BPS

Tabel 9.
Gambaran Kondisi Perempuan di Provinsi Jawa Timur

Perempuan di wilayah perdesaan	Kepala Rumah Tangga Perempuan
Capaian rata-rata lama sekolah usia ≥ 15 tahun: 6,55	Jumlah: 17,36%
Jenjang pendidikan tertinggi usia ≥ 15 tahun: SD/ sederajat (29,50%)	Menggunakan air minum bersih: 73,91%
Pendidikan usia ≥ 15 tahun: tidak memiliki ijazah; mayoritas lulusan SD/ sederajat	Menggunakan sanitasi layak: 58,79%
Memiliki keluhan kesehatan, sakit, dan tidak berobat jalan: 64,10%	Pendidikan SMA+: 14,03%
Menikah pada usia < 19 tahun: 51,55%	Berijazah SD/ sederajat dan tidak memiliki ijazah di pedesaan: 86,96%

Sumber: KPPPA (2020)

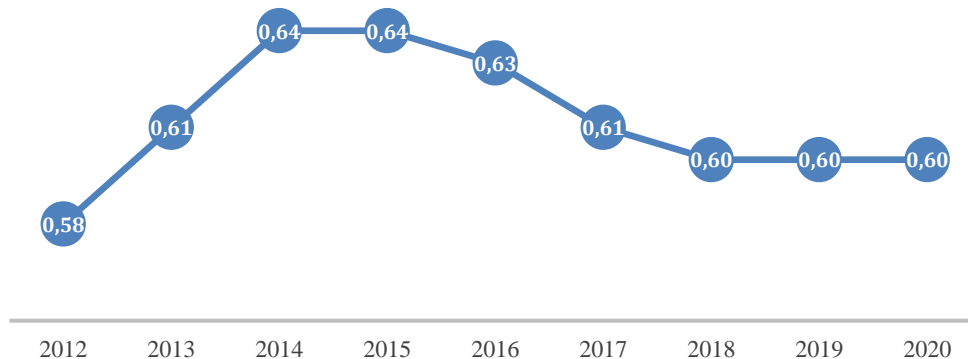
Berdasarkan data KPPPA (2020), kondisi perempuan wilayah perdesaan dan kepala rumah tangga perempuan di Jawa Timur masih mengalami beberapa keterbelakangan dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia. Padahal, Jawa Timur memiliki persentase kepala rumah tangga perempuan yang berada di atas rata-rata nasional, yaitu sebesar 17,36% dan juga persentase jumlah penduduk perempuan yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Keterbelakangan tersebut baik dalam bidang pendidikan maupun kualitas hidup layak dibandingkan dengan laki-laki sebagaimana terdapat pada Tabel 9.

Pengaruh Rasio Pengeluaran Perkapita terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil uji regresi *time series* diperoleh hasil bahwa variabel rasio pengeluaran perkapita memiliki pengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini berarti bahwa kenaikan rasio pengeluaran perkapita sebesar 1 poin akan mengakibatkan kenaikan kemiskinan sebesar 16,31%, tetapi tidak signifikan.

Pada Grafik 4 dapat dilihat tren pengeluaran perkapita yang merepresentasikan standar hidup layak bahwa rasio pengeluaran perkapita perempuan dan laki-laki sempat mengalami tren meningkat hingga tahun 2015. Namun, setelah itu rasio pengeluaran perkapita mengalami tren menurun dan stagnan hingga tahun 2020. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan tren penurunan kemiskinan yang dialami oleh Provinsi Jawa Timur pada periode tersebut. Selain itu, hal ini menunjukkan pula bahwa pengeluaran perkapita perempuan hingga saat ini masih belum mengalami perbaikan dibandingkan laki-laki yang juga menyiratkan bahwa tingkat kesejahteraan perempuan pun masih lebih rendah dibandingkan laki-laki dan masih adanya ketimpangan gender yang cukup besar sebagaimana diungkapkan oleh Agbodji et al. (2015). Rendahnya kualifikasi yang dimiliki oleh perempuan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 9 merupakan salah satu faktor yang berpengaruh atas terbatasnya akses mereka terhadap sumber daya ekonomi sebagaimana diungkapkan oleh Matthew et al. (2020).

Grafik 4.
Rasio Pengeluaran Perkapita Jawa Timur 2012-2020



Sumber: BPS

Jumlah anggota keluarga juga berkaitan dengan pengeluaran perkapita penduduk khususnya pada kepala rumah tangga perempuan. Pada tahun 2019, setiap kelompok distribusi pengeluaran perkapita penduduk Jawa Timur memiliki pola yang berbeda dalam jumlah anggota rumah tangga. Pada kelompok 40% terbawah, kepala rumah tangga perempuan didominasi dengan jumlah anggota keluarga >3, yaitu sebesar 53,51%. Sedangkan, untuk kelompok 40% menengah dan kelompok 20% teratas, mayoritas kepala rumah tangga perempuan memiliki jumlah anggota rumah tangga 1-2 orang saja. Pola serupa tidak ditemui pada kepala rumah tangga laki-laki karena pada semua kelompok distribusi pengeluaran didominasi oleh jumlah anggota rumah tangga >3 orang. Hal ini pun terjadi di hampir seluruh provinsi di Pulau Jawa.

Dengan kondisi jumlah anggota rumah tangga yang dimiliki, kepala rumah tangga perempuan di Jawa Timur yang menerima bansos beras sejahtera persentasenya relatif kecil, yaitu sebesar 2,38% untuk di perkotaan dan 10,03% di pedesaan. Namun, angka ini lebih besar dibandingkan dengan kepala rumah tangga laki-laki. Selain itu, beras yang dibeli pun dalam empat bulan terakhir mayoritas hanya kurang dari 10 kg. Hal ini dapat diduga karena mereka menekan pengeluarannya atas konsumsi kebutuhan dasar untuk dapat memenuhi kebutuhan pengeluaran lainnya. Sebagai contoh, 91,35% kepala rumah tangga perempuan memiliki aset dan 62,65%-nya memiliki aset transportasi. Meskipun demikian, kepemilikan kepala rumah tangga perempuan terhadap aset rumah tangga dan aset

rumah tangga lainnya relatif lebih kecil, yaitu hanya sebesar 60,85% dan 77,44%. Kepala rumah tangga perempuan yang menerima kredit pun lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki, yaitu hanya sebesar 19,27%. Hal ini mengindikasikan bahwa mereka lebih condong untuk menahan pengeluaran terkait konsumsi, tetapi dialihkan untuk pengeluaran atas barang-barang yang bersifat lebih tahan lama serta tidak banyak menggunakan kredit baik konsumtif maupun produktif. Inklusi keuangan (edukasi) menjadi poin perhatian pula disini untuk dapat meningkatkan pemahaman kepala rumah tangga perempuan agar dapat lebih bijak lagi dalam memanfaatkan dan mengelola aset dan sumber daya ekonomi lain yang dimilikinya untuk perencanaan keuangan yang lebih baik.

Jumlah kepala rumah tangga perempuan yang menerima jaminan sosial di tahun 2019 lebih banyak dibandingkan kepala rumah tangga laki-laki, yaitu sebesar 8,65 dari 8,71%. Namun, di pedesaan angka penerima jaminan sosial kepala rumah tangga perempuan ini sangat rendah, yaitu hanya sebesar 4,07% termasuk juga kepala keluarga laki-laki yang hanya 4,43%. Angka ini merupakan yang paling rendah di Pulau Jawa dibandingkan dengan provinsi lainnya. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keluarga di pedesaan kemungkinan belum terdata untuk mendapatkan jaminan sosial atau mungkin tidak memiliki informasi atau pengetahuan mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya pendataan kembali untuk penduduk miskin dan rentan untuk efektivitas sasaran penerima bansos/jaminan sosial. Apalagi, persentase penduduk perempuan di pedesaan yang memiliki keluhan kesehatan juga lebih besar dibandingkan laki-laki. Implikasinya adalah kondisi seperti ini dapat menyebabkan kesejahteraan perempuan terganggu karena kurangnya kepedulian terhadap kesehatan dan bahkan pengeluaran yang seharusnya untuk kebutuhan dasar dapat teralihkan untuk permasalahan kesehatan ini sehingga memperkuat permasalahan feminisasi kemiskinan.

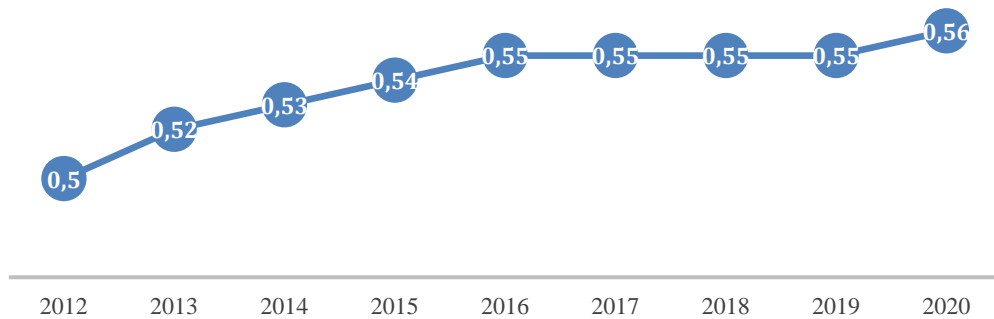
Pengaruh Rasio Sumbangan Pendapatan terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil uji regresi *time series* diperoleh hasil bahwa variabel rasio sumbangan pendapatan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini berarti bahwa kenaikan rasio sumbangan pendapatan sebesar 1 poin akan mengakibatkan penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan sebesar 47,42%.

Indikator lain yang terkait dengan aspek ekonomi ketimpangan gender adalah sumbangan pendapatan. Pada Grafik 5 dapat kita lihat bahwa sumbangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun yang sejalan dengan tren penurunan kemiskinan Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan pendapatan perempuan mengalami perbaikan dan makin meningkat persinya dibandingkan dengan laki-laki meskipun masih berada pada level yang lebih rendah.

Grafik 5.

Rasio Sumbangan Pendapatan Jawa Timur 2012-2020



Sumber: BPS

Salah satu hal yang terkait erat dengan sumbangan pendapatan sebagaimana disampaikan oleh Bappenas (2020) adalah lapangan usaha tempat perempuan bekerja. Pada tahun 2018, mayoritas penduduk perempuan bekerja di Jawa Timur berada pada sektor lapangan usaha terbesar di Jawa Timur, yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan, kemudian diikuti dengan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, serta industri pengolahan. Jenis lapangan usaha ini sama juga halnya dengan yang dilakukan oleh mayoritas penduduk laki-laki bekerja di Jawa Timur, tetapi dengan jumlah yang berbeda cukup jauh tentunya. Jumlah penduduk perempuan yang bekerja di sektor pertanian adalah sebesar 31,48% dari total penduduk perempuan bekerja. Namun, perlu diwaspadai adanya perlambatan dalam pertumbuhan produksi pertanian akibat berkurangnya lahan pertanian. Dengan demikian, perlu adanya formulasi strategi baru khususnya untuk para pekerja perempuan yang mayoritas bekerja pada sektor

pertanian, kehutanan, dan perikanan agar dapat meningkatkan produktivitasnya, misalnya melalui usaha agrobisnis.

Di sisi lain, penduduk perempuan yang menempati lapangan pekerjaan yang produktivitasnya tinggi sebagaimana disampaikan oleh Bappenas (2020), yaitu pertambangan, gas, informasi dan komunikasi masih sangat kecil sekali jumlahnya dan paling banyak hanya mencapai setengahnya dari jumlah pekerja laki-laki. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan perempuan dalam sektor lainnya, selain sektor pertanian juga perlu untuk dilakukan, misalnya dalam bidang informasi dan teknologi untuk dapat meningkatkan pendapatan mereka. Peningkatan kapabilitas perempuan dalam bidang informasi dan teknologi juga dapat menjadi salah satu transmisi untuk menggalakkan *e-commerce* di sektor usaha lainnya, misalnya sektor pertanian.

Penduduk perempuan bekerja di Provinsi Jawa Timur masih didominasi oleh yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai dan pekerja keluarga/tidak dibayar sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 6. Jumlah pekerja perempuan sebagai buruh/karyawan/pegawai adalah yang paling besar. Sedangkan, kelompok kedua terbesar adalah perempuan yang bekerja sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar dan jumlahnya tentu saja lebih besar dibandingkan laki-laki. Kondisi ini merupakan salah satu contoh dari peran ganda yang dimiliki oleh perempuan dalam kehidupannya.

Grafik 6.

Komposisi Penduduk Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin



Tahun 2017

Sumber: BPS

Banyaknya jumlah perempuan yang menjadi pekerja keluarga/tidak dibayar memperlihatkan bahwa struktur norma sosial masih cukup melekat pada penduduk Provinsi Jawa Timur sehingga perempuan masih diutamakan untuk mengerjakan pekerjaan domestik. Selain itu, budaya ketimuran Indonesia yang masih lekat dengan budaya gotong royong dan kekeluargaan pun masih cukup kuat sehingga perempuan tidak berkeberatan pada saat harus bekerja membantu tetangganya meskipun tidak mendapat bayaran. Hal ini sangat disayangkan karena jumlah angkatan kerja perempuan masih cukup rendah di Jawa Timur, yaitu hanya mencakup 56,56% dari total penduduk perempuan. Seharusnya dari jumlah tersebut dapat lebih dioptimalkan lagi agar perempuan dapat memberdayakan dirinya secara maksimal dan mampu untuk meningkatkan pendapatannya sebagaimana diungkapkan oleh Putrie & Rahman (2019).

Pemberdayaan perempuan juga dapat membantu meningkatkan kualitas hidupnya saat menjalankan peran ganda sehingga tidak terjatuh ke dalam feminisasi kemiskinan. Hal ini sebagaimana diungkapkan pula oleh Marianti (2014) bahwa seharusnya perempuan kesejahteraannya dapat meningkat jika mengkombinasikan antara pengerjaan tugas domestik dengan bekerja untuk diversifikasi pendapatan. Tentunya, partisipasi perempuan dari rumah tangga miskin dan rentan juga harus turut dilibatkan untuk dapat meningkatkan kapabilitas, sumber pendapatan dan kesejahteraannya. Hal sederhana yang dapat dilakukan disesuaikan dengan latar belakang mereka misalnya adalah dengan berdagang atau membuka warung.

Berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan penanggulangan feminisasi kemiskinan (PFK), Pemerintah Jawa Timur telah memiliki beberapa program yang cukup baik dalam penanggulangan kemiskinan pada kepala rumah tangga perempuan. Salah satunya adalah dengan program Jalin Matra (Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera) yang dilakukan diantaranya melalui pemberian bantuan modal usaha produktif kepada perempuan yang berada pada kelompok 10% tingkat kesejahteraan terendah. Namun, Utomo & Haryani (2019) mendapati bahwa program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) melalui Jalin Matra masih terdapat sasaran yang masih kurang fokus dan homogenitas penerima sasaran meskipun dalam implementasinya cukup optimal. Program lainnya adalah implementasi Program Keluarga Harapan (PKH). Akan tetapi, kendala dari

program ini menurut Suintiana, Kanto, & Soenyono (2015) adalah kurangnya aspek partisipasi perempuan khususnya keterlibatan peran perempuan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dalam proses awal perencanaan sampai dengan evaluasi. Oleh karena itu, perlu digaris bawahi bahwa pendataan yang terintegrasi dan komprehensif sangat penting dalam proses formulasi kebijakan sehingga dapat lebih tepat sasaran dalam implementasinya.

Pengaruh Rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil uji regresi *time series* diperoleh hasil bahwa variabel rasio tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki pengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini berarti bahwa kenaikan rasio tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 1 poin akan mengakibatkan kenaikan kemiskinan sebesar 4,56%, tetapi tidak signifikan.

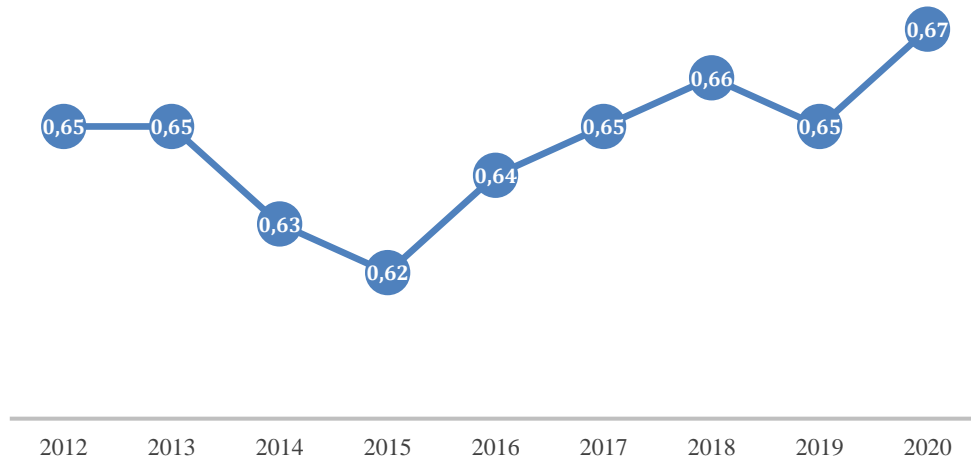
Jumlah penduduk perempuan Provinsi Jawa Timur lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki dan jumlahnya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Namun, peningkatannya tidak sebesar pada jumlah penduduk usia produktif laki-laki. Hal ini akhirnya menyebabkan jumlah penduduk laki-laki dengan usia produktif sedikit lebih banyak dari perempuan, yaitu sebesar 14.287.665 dari 14.282.867. Hal ini tentunya sedikit banyak akan berkaitan pula dengan TPAK.

Berkaitan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), pada Grafik 6 dapat dilihat bahwa terdapat fluktuasi dalam tren TPAK di Jawa Timur yang tidak selaras dengan tren penurunan kemiskinannya. TPAK perempuan pernah mengalami penurunan hingga tahun 2015, berkebalikan dengan tren rasio pengeluaran perkapita. Setelah itu, TPAK perempuan kembali mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2018 kemudian menurun dan meningkat kembali pada tahun 2020. Namun, berdasarkan Grafik 6 dapat disimpulkan bahwa proporsi partisipasi kerja perempuan di bidang ekonomi masih memiliki kesenjangan dengan laki-laki. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan usia produktif, rasio TPAK ini menunjukkan bahwa belum seluruhnya perempuan usia produktif di Jawa Timur aktif secara ekonomi. Berdasarkan data BPS (2020), penduduk perempuan bukan angkatan kerja mencapai 43,44% dari total perempuan

atau sejumlah 7.016.726 jiwa dan 76,37% dari jumlah tersebut mengurus rumah tangga. Angka ini cukup jauh dari penduduk laki-laki yang 84,67%-nya merupakan angkatan kerja.

Grafik 7.

Tren Rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Jawa Timur 2012-2020



Sumber: BPS

Menurut KPPPA (2020), rata-rata upah/gaji, status perkawinan, dan relasi gender akan mempengaruhi tinggi rendahnya TPAK. Secara nasional, rata-rata upah/gaji pekerja laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja laki-laki baik di pedesaan maupun di perkotaan dengan jenjang pendidikan yang sama. Meskipun demikian, semakin tinggi jenjang pendidikan, rata-rata upah/gaji pun akan semakin naik. Hal yang menjadi fokus perhatian disini adalah perempuan dan kepala rumah tangga perempuan di Jawa Timur mayoritas adalah lulusan SD/ sederajat. Selain itu, 54,11% penduduk Jawa Timur yang memiliki status kawin adalah perempuan dan kebanyakan mereka telah menikah pada usia kurang dari 19 tahun. Hal ini tentu saja menjadi salah satu faktor yang akan sangat berdampak pula terhadap masih belum maksimalnya TPAK perempuan di Jawa Timur dan menurunkan rata-rata upah/gaji yang diterima.

Pada tahun 2019, rata-rata upah/gaji bersih penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja sebagai buruh/karyawan di Jawa Timur adalah sebesar Rp2.067.293 untuk perempuan dan Rp2.716.611 untuk laki-laki. Besaran rata-rata upah/gaji perempuan di pedesaan jauh lebih rendah, yaitu sebesar Rp1.503.424

dibandingkan laki-laki di pedesaan yang sebesar Rp 2.179.599,00 dan dibandingkan dengan perempuan di perkotaan yang sebesar Rp2.307.693,00. Akan tetapi, dalam beberapa lapangan pekerjaan, rata-rata upah/gaji perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki, yaitu dalam bidang real estate, transportasi dan pergudangan, konstruksi, dan pengadaan listrik (KPPPA, 2020). Namun, hal ini belum dimanfaatkan dengan optimal karena jumlah perempuan yang bekerja pada sektor ini masih rendah.

Tingkat partisipasi angkatan kerja berkorelasi juga dengan jam kerja. Berdasarkan data pada Tabel 10, sebagian penduduk perempuan masih bekerja kurang dari jam kerja normal 35 jam selama seminggu pada rentang waktu 2016-2018. Sedangkan, penduduk bekerja laki-laki lebih banyak komposisinya yang bekerja selama lebih dari 35 jam dalam seminggu. Dengan kondisi seperti itu, sebagian pekerja perempuan tersebut tentu saja masuk ke dalam kategori setengah penganggur atau pekerja paruh waktu karena bekerja di bawah jam kerja normal baik karena masih mencari pekerjaan atau memang tidak bersedia menerima pekerjaan lainnya. Hal ini dapat disebabkan karena peran ganda yang dijalankan oleh perempuan sehingga membatasi mereka untuk bekerja penuh waktu.

Tabel 10.

Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja⁷

Jam kerja seluruhnya	Laki-laki			Perempuan		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
0-14	767.890	322.566	607.122	1.300.084	409.526	875.505
15-24	890.177	411.529	866.567	1.230.353	714.444	1.198.442
25-34	1.166.436	840.364	1.244.328	1.122.207	1.159.285	1.109.142
35 +	9.250.440	10.373.365	8.774.753	4.722.362	5.868.141	4.438.704

⁷ BPS

Kondisi jam kerja perempuan yang kurang dari jam kerja normal tersebut secara sekilas dapat dijelaskan lebih lanjut melalui data jumlah pencari kerja yang dipublikasikan oleh BPS. Berdasarkan data BPS, jumlah perempuan yang mencari kerja pada tahun 2016 dan tahun 2017 lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki yang mencari kerja. Sebagai contoh, pada tahun 2016 terdapat 371.050 penduduk perempuan yang mencari kerja dan 275.364 penduduk laki-laki yang mencari kerja. Begitu pula halnya pada tahun 2017, terdapat 363.560 penduduk perempuan yang mencari kerja dan 339.010 penduduk laki-laki yang mencari kerja. Permintaan dan lowongan pekerjaan yang tersedia untuk perempuan naik pada tahun 2017 bahkan dengan angka yang lebih tinggi dari permintaan dan lowongan pekerjaan untuk laki-laki sehingga hanya menyisakan sedikit saja perempuan yang belum ditempatkan kerja. Dengan demikian, kemungkinan pekerjaan yang disediakan untuk perempuan di provinsi Jawa Timur merupakan jenis pekerjaan dengan produktivitas rendah ataupun pekerjaan informal yang tidak menuntut jumlah jam kerja dalam waktu lama yang tentu saja berkorelasi dengan tingkat upah/gaji yang rendah dan TPAK-nya.

Pemerintah khususnya Pemda harus memformulasikan strategi kebijakan jangka panjang untuk dapat mengatasi permasalahan rendahnya TPAK perempuan di Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualifikasi perempuan usia produktif di Jawa Timur khususnya yang tinggal di pedesaan melalui sosialisasi program pendidikan formal dan nonformal seperti PKBM dan pengembangan keterampilan/keahlian lainnya. Upaya lainnya adalah dengan meningkatkan kualitas hidup perempuan di pedesaan dengan mengadakan sensus desa untuk mengetahui kebutuhan mereka kemudian memberikan prioritas mengenai upaya penanganannya.

Kesimpulan dan Rekomendasi/Implikasi Kebijakan

Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh beberapa aspek ekonomi dalam ketimpangan gender terhadap tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur masih berada di atas tingkat kemiskinan nasional dan memberikan kontribusi cukup besar terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau

Jawa. Pencapaian yang baik terkait program pengarusutamaan gender di Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat menjadi salah satu transmisi untuk dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Berdasarkan tinjauan literatur, pengeluaran perkapita, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan sumbangan pendapatan merupakan beberapa aspek ekonomi dalam ketimpangan gender yang memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Objek penelitian ini adalah Provinsi Jawa Timur yang memiliki capaian program pengarusutamaan gender yang cukup baik dengan diterimanya penghargaan APE kategori Mentor dari KPPPA pada tahun 2018 yang juga meliputi beberapa kabupaten/kota di wilayahnya. Selain itu, tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur juga berada di atas tingkat kemiskinan nasional dan merupakan salah satu Provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terbesar dalam jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari situs BPS dalam kurun waktu 2012-2020 dengan menggunakan data kemiskinan periode September setiap tahunnya.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda untuk data *time series* terhadap variabel yang digunakan dalam penelitian. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi rasio pengeluaran perkapita, rasio sumbangan pendapatan, dan rasio tingkat partisipasi angkatan kerja. Sedangkan, variabel dependennya adalah tingkat kemiskinan. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model memenuhi semua persyaratan untuk pengolahan data *time series*. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian terhadap hipotesis melalui Uji F atau uji simultan, Uji t atau uji parsial, dan uji koefisien determinasi yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu pengolahan data berupa STATA 16 MP.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda dapat disimpulkan bahwa variabel yang berpengaruh secara signifikan dengan arah koefisien negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur hanya variabel rasio sumbangan pendapatan. Variabel independen lainnya yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel rasio pengeluaran perkapita dan variabel rasio tingkat partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh secara signifikan dengan arah koefisien positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Persamaan regresi penelitian ini dapat dikatakan baik karena variabel rasio pengeluaran perkapita, rasio sumbangan pendapatan, dan rasio tingkat partisipasi angkatan kerja mampu menjelaskan variasi pada tingkat kemiskinan sebesar 68,66%.

Masih terjadi ketimpangan gender di Provinsi Jawa Timur yang dapat terlihat pada rasio pengeluaran perkapita, rasio tingkat partisipasi angkatan kerja, dan rasio sumbangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur yang masih relatif rendah. Kemiskinan di Jawa Timur didominasi oleh penduduk perempuan khususnya di pedesaan. Faktor demografi dan beberapa hal lainnya turut mempengaruhi hal tersebut, diantaranya adalah tingkat pendidikan, kualitas hidup layak, kesehatan, jumlah anggota keluarga, status perkawinan, komposisi jenis pekerjaan penduduk perempuan, rata-rata upah, jam kerja, dan lapangan usaha tempat bekerja yang diwarnai pula dengan struktur sosial yang masih berada di masyarakat.

Rasio pengeluaran perkapita antara laki-laki dan perempuan di Jawa Timur bersifat fluktuatif dan relatif stagnan hingga saat ini yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Kepala rumah tangga perempuan menanggung beban jumlah anggota rumah tangga yang lebih banyak dibandingkan laki-laki khususnya pada penduduk kelompok 40% ke bawah. Akan tetapi, jumlah perempuan penerima bansos beras sejahtera dan jaminan sosial masih relatif sedikit. Dari segi kualitas hidup pun, perempuan khususnya di daerah pedesaan masih lebih tertinggal antara lain dalam hal sanitasi, air bersih, dan kesehatan. Inklusi keuangan menjadi salah satu hal penting agar perempuan dapat lebih baik dalam mengelola aset dan sumber daya ekonominya. Selain itu, isu sosialisasi jaminan sosial serta pendataan masyarakat miskin dan rentan pun sangat penting untuk efektivitas sasaran penyaluran bansos.

Rasio sumbangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur memiliki tren cukup baik karena terus mengalami peningkatan. Penduduk perempuan di Provinsi Jawa Timur utamanya bekerja pada tiga besar sektor perekonomian di Jawa Timur, yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan, kemudian diikuti dengan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, serta industri pengolahan. Namun, perempuan jumlahnya masih sangat sedikit yang bekerja pada sektor yang produktivitasnya tinggi seperti pertambangan, gas, serta informasi dan

komunikasi. Penduduk perempuan juga mayoritas masih bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai dan pekerja keluarga/tidak dibayar sehingga tentu saja sumbangan pendapatannya masih belum dapat signifikan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Variabel rasio sumbangan pendapatan merupakan satu-satunya variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi untuk dapat meningkatkan nilai rasio sumbangan pendapatan ini dengan mengungkit kenaikan sumbangan pendapatan perempuan. Perlu adanya optimalisasi kebijakan pemberdayaan perempuan yang terintegrasi dengan kebijakan pengarusutamaan gender di Provinsi Jawa Timur yang sudah baik hingga satuan daerah paling kecil (perdesaan) serta menyentuh masyarakat miskin dan rentan. Hal ini bertujuan agar perempuan dapat meningkatkan pendapatannya melalui diversifikasi pendapatan khususnya bagi kelompok perempuan rumah tangga miskin dan rentan. Selain itu, evaluasi atas program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan sebelumnya juga sangat diperlukan agar program tersebut dapat berjalan efektif dan efisien.

Rasio TPAK antara perempuan dan laki-laki di Jawa Timur pun mengalami fluktuasi dari tahun-ke tahun yang menandakan ketimpangan gender masih terjadi. Penduduk perempuan di Jawa Timur 43,44%-nya bukan merupakan angkatan kerja dan didominasi mengurus rumah tangga. Selain itu, penduduk usia produktif perempuan dan angkatan kerjanya masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Dari segi kualifikasi bekerja, terdapat keterbatasan berupa tingkat pendidikan perempuan yang masih didominasi oleh lulusan SD/ sederajat dan SMP/ sederajat juga sebagian besar perempuan sudah menikah pada usia muda. Hal lainnya yang berpengaruh adalah rata-rata upah/gaji pekerja dan jam kerja laki-laki yang selalu lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualifikasi penduduk perempuan khususnya yang berada pada usia produktif sangat diperlukan baik melalui pendidikan formal maupun nonformal misalnya melalui PKBM dan pengembangan keterampilan/keahlian lainnya.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena rentang waktu pengambilan datanya cukup terbatas hanya tahun 2012-2020. Selain itu, terdapat data yang tidak seragam pada bagian diskusi karena keterbatasan ketersediaan data yang tersedia.

Oleh karena itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengambil periode waktu yang lebih panjang dan data yang lebih seragam. Tambahan pendekatan kualitatif berupa wawancara juga dapat dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang dibahas dalam penelitian ini.

Referensi

- Agbodji, A. E., Batana, Y. M., & Ouedraogo, D. (2015). Gender inequality in multidimensional welfare deprivation in West Africa: The case of Burkina Faso and Togo. *International Journal of Social Economics*, 42(11), 980–1004. <https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2013-0270>
- Arora, R. U. (2012). Gender Inequality, Economic Development, and Globalization: A State Level Analysis of India. *The Journal of Developing Areas*, 46(1), 147–164. <https://doi.org/10.1353/jda.2012.0019>
- Bappenas. (2020). *Capaian Implementasi PPRG tingkat Nasional*.
- BPS. (2021). *Indeks Pembangunan Manusia 2020*.
- Espinoza-Delgado, J., & Silber, J. (2018). Multi-dimensional poverty among adults in Central America and gender differences in the three I's of poverty: Applying inequality sensitive poverty measures with ordinal variables. *Munich Personal RePEc Archive*.
- Fodor, E., & Horn, D. (2015). Economic development and gender equality: Explaining variations in the gender poverty gap after socialism. *Social Problems*, 62(2), 286–308. <https://doi.org/10.1093/socpro/spv007>
- Forum, W. E. (2021). *Global Gender Gap Report 2021* (Issue March). <http://reports.weforum.org/global-https://www.bps.go.id/>
<https://jatim.bps.go.id/>
<https://sdgs.un.org/goals>
- KPPPA, K. P. P. D. P. A. R. I. (2020). *Profil Perempuan Indonesia 2020*.
- Marianti, R. (2014). Mencari Jalan Keluar dari Kemiskinan di Jawa Timur, Maluku Utara, dan Timor Barat. In *Seeking a Way Out of Poverty in East Java, North Maluku, and West Timor*. Jakarta: The SMERU Research Institute.
- Matthew, O., Adeniji, A., Osabohien, R., Olawande, T., & Atolagbe, T. (2020).

- Gender Inequality, Maternal Mortality and Inclusive Growth in Nigeria. *Social Indicators Research*, 147(3), 763–780.
<https://doi.org/10.1007/s11205-019-02185-x>
- Nisak, S. S., & Sugiharti, L. (2020). Gender inequality and women poverty in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11(9), 375–387.
- Olabanji, O. (2020). Gender Inequality and Poverty Menace: The Challenges of Achieving Shared Prosperity in Nigeria. *Academic Conferences and Publishing International Limited Reading*.
<https://doi.org/10.34190/igr.20.160>
- Oyekanmi, A. A., & Moliki, A. O. (2021). An Examination Of Gender Inequality And Poverty Reduction. *Journal of Sustainable Development in Africa*, 23(1), 31–43.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 10.
- PPN/Bappenas, K. (2020). *Tanggapan Studi Perlindungan Kesehatan Bagi Perempuan Miskin di Indonesia*.
- Purnama, A. (2019). Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi melalui Peningkatan Kesejahteraan Keluarga. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 17(4), 319–328.
- Putrie, D. A., & Rahman, A. (2019). Analisis dan Pemodelan Pendapatan Pekerja Perempuan di Indonesia menggunakan Data Panel. *Seminar Nasional Official Statistics 2019: Pengembangan Official Statistics Dalam Mendukung Implementasi SDGs*, 1269–1276.
- Rogan, M. (2014). Poverty may have declined, but women and female-headed households still suffer most. *Econ 3x3*, 2014, 1–8.
[http://www.econ3x3.org/sites/default/files/articles/Rogan 2014 Gender and MPI FINAL.pdf](http://www.econ3x3.org/sites/default/files/articles/Rogan%202014%20Gender%20and%20MPI%20FINAL.pdf)
- Sari, R. P., Sarfiah, S. N., & Indrawati, L. R. (2019). Analisis Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2011-2017, *DINAMIC: Directory Journal of ...*, 1, 467–478.

<http://jom.untidar.ac.id/index.php/dinamic/article/view/808/464>

- Siscawati, M., Adelina, S., Eveline, R., Siscawati, M., Adelina, S., Eveline, R., & Anggriani, S. (2020). Gender Equality and Women Empowerment in The National Development of Indonesia. *Journal of Strategic and Global Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.7454/jsgs.v2i2.1021>
- Statistik, K. P. P. dan P. A. dengan B. P. (2018). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*.
- Suntiana, L., Kanto, S., & Soenyono. (2015). Rancangan Model Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Pemberdayaan Perempuan (Kajian terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember). *Jurnal Wacana Vol.18 No.3*, 146 - 157.
- Tang, C. S. (2020). Innovative Technology and Operations for Alleviating Poverty through Women's Economic Empowerment. *Production and Operations Management*, 1–25. <https://doi.org/10.1111/poms.13349>
- Utomo, K. S., & Haryani, T. N. (2019). Mengurai Feminisasi Kemiskinan Kepala Rumah Tangga Perempuan (Kajian pada Program PFK Jalin Matra). *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media Vol.3 No.1, April 2019*, 15 - 23.
- Vaismoradi, M., Jones, J., Turunen, H., & Snelgrove, S. (2016). Theme development in qualitative content analysis and thematic analysis. *Journal of Nursing Education and Practice*, 6(5). <https://doi.org/10.5430/jnep.v6n5p100>
- Walid, & Pratama, B. R. (2020). Analysis of Gender Inequality in Poverty Reduction Program. *Economics Development Analysis Journal*, 9(4), 482–497. <https://doi.org/10.15294/edaj.v9i4.41950>
- World Bank. (2021). *Indonesia High-frequency Monitoring of Covid-19 Impacts* (Issue May). <https://pubdocs.worldbank.org/en/523171610628217948/Indonesia-COVID-HiFy-R1.pdf>